

Pengaruh Pendapatan Asli daerah Dan dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Karawang Tahun 2008-2022

Agnia Afifah Adha^{1*}, Solihin Sidik²

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional original income, and balance funds partially and simultaneously on regional financial independence in Karawang regency. This study uses a quantitative research type using primary data and secondary data obtained from the 2008-2022 Budget Realization Report in Karawang Regency. The sample used in this study was saturated sampling with a total of 15 observational data for three years. The results of the study show that Regional Original Income has a positive and significant effect on regional financial independence in Karawang Regency in 2008-2022. Balancing Funds have a negative and significant effect on regional financial independence in Karawang Regency in 2008-2022. significant for Regional Financial Independence in Karawang Regency in 2008-2022.

Keywords: *regional original income_1, balancing funds_2, financial independence_2*

✉ Corresponding author : Agnia Afifah Adha

Email Address : agniaafifah18@gmail.com (Jl. HS. Ronggowaluyo, Puseur jaya, teluk jambe Timur Kab Karawang 41361)

1. Pendahuluan

Berlandaskan iUU iNomor i22 iTahun i1999 iyang ketika berganti menjadi iUndang-undang Nomor i32i Tahuni 2004i diubah menjadi iUndang-undang iNomor i23 iTahun i2014 iterhadap Pemerintah Daerahi dari iketentuan iMPR-RI iNomor iXV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraani Otonomii Daerah. UUi yang tercantum menggambarkan landasan ketentuan pada wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Edgar, Zainudin, 2013:47).

Otonomi daerah menyerahkan kesempatan kepada daerah secara mandiri untuk menggolongkan dan menjaga keluarganya secara mandiri dengan menggali dan menikmati sumber daya ekonomi yang ada untuk kenyamanan serta ketenangan masyarakat setempat berdasarkan prinsip demokrasi, gagasan pemetaan dan kearifan, serta prakarsa sesuai dengan suara masyarakat dan kondisi serta keragaman wilayahnya berdasarkan iUU iNo. 23i tahun i2014.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Kemandiriani daerahi dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerahi kepada pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan, mengingat pelaksanaan program pembenahan wilayah di berbagai bidang membutuhkan biaya/investasi yang cukup besar. Daerahi yang dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat dapat dianggap sebagai daerah otonom. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah ditunjukkan dengan ikemandirian idaerah yang disebut juga dengan otonomi fiskal.

Berikut Tingkat Kemandiriani Keuangani Daerahi pada Kabupaten Karawang Periode 2008-2022, yaitu:

Tabel 1 Tingkat Kemandiriani Keuangani Daerahi pada

Kabupaten Karawang Periode 2008-2022

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah
2008	12,24%
2009	11,08%
2010	13,32%
2011	16,47%
2012	36,59%
2013	32,57%
2014	40,59%
2015	38,11%
2016	35,02%
2017	51,92%
2018	42,47%
2019	44,39%
2020	46,78%
2021	54,52%
2022	51,02%

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandiriani keuangani daerahi Kabupaten Karawang pada tahun 2008 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat kemandiriani yang paling kecil di tahun 2009 sebesar 11,08% dan ikemandirian ikeuangan yang tinggi di tahun 2021 sebesar 54,52%.

Pendapatani aslii daerahi dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Tingginya iPAD suatu daerah menyebabkan wilayah tersebut berupaya menjalankan kegiatan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah pusat melalui idana iperimbangan. Pendapatani Aslii Daerahi (PAD) dapat meningkat apabila iPemerintah iDaerah iKabupaten Karawang mampu menggali potensi sumber ipendapatan iasli daerahnya dengan baik. Salah satunya, sumber ipendapatan iasli idaerah yang harus dikelola dengan baik yaitu pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang.

Dana Perimbangan yang kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi lebih mementingkan pada aspek belanja. Hal itu berakibat pemerintah daerah kurang mengeksplorasi pajak lokal secara lebih optimal dan selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat. Pembiayaan belanja daerah akan mengalami ketergantungan yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat apabila kondisi ini terus berlanjut.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan penyerahan wewenang tersebut tentunya pemerintah pusat berharap agar Kabupaten Karawang dapat menggali potensi daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal dan subsidi dari pemerintah pusat.

Berikut adalah hasil rekap realisasi anggaran pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yaitu:

**Tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
pada Kabupaten Karawang Periode 2008-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)
2008	131.785.038.000	924.076.916.000
2009	133.730.718.100	1.025.587.475.224
2010	186.949.234.601	1.121.038.108.120
2011	378.630.051.818	1.168.329.344.076
2012	658.597.372.181	1.413.869.849.941
2013	660.841.119.615	1.528.879.268.723
2014	909.158.490.944	1.580.220.357.071

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Dana Perimbangan (Rupiah)
2015	935.009.471.470	1.675.550.995.652
2016	943.596.855.369	2.151.419.145.460
2017	1.398.309.963.116	2.017.808.510.547
2018	1.169.569.261.195	2.048.785.689.308
2019	1.356.319.882.910	2.138.791.255.642
2020	1.303.353.416.438	1.990.406.413.616
2021	1.651.850.841.989	2.064.399.869.185
2022	1.617.783.012.031	2.245.012.786.660

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa iPAD tahun 2008-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi iPAD tahun 2018-2022 mengalami! kenaikan! dan! penurunan! setiap! !tahunnya. Pada iDana iPerimbangan tahun 2008-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2017-2022 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Ketidakstabilani anggaranani merupakan masalahi yangi perliu diselesaikani dengani berbagaii macami upayai dani kebijakani dari pemerintahi daerahi Kabupaten Karawang, untuk itu peningkatani pendapatani daerahi diharapkani dapat imenunjang idalam prosesi pembangunani daerahi dan imenstabilisasikani keuangani serta imampu isecara mandirii dalam imengelola sumber-sumberi dayai dan ipotensi yangi adai di iKabupeten Karawang.

Berdasarkan latari belakangi yangi telah dipaparkani makai penelitia tertariki untuki menelitia dan mengkajii lebih dalam itentang "Pengaruhi Pendapatani Aslii Daerahi dan Danai Perimbangani terhadap iKemandirian iKeuangan iPemerintah iDaerah di iKabupaten Karawang Tahun 2008-2022".

2. Kajian Literatur

Kemandiriani Keuangani Daerahi

Tingkat independensi keuangan daerahi ini, diperkirakan dengan memperhitungkan Pendapatan Aslii Daerahi dan Total iPendapatan iAsli iDaerah yang didapat iDaerah dalam Laporan Realisasi APBD. Tujuan untuk menilai independensi keuangani daerahi mencerminkan suatu bentuk pemerintahani daerahi terlepas dari apakah dapat melakukan kewajibannya dengan tepat. Rasio kemandiriani menurut Handayani & Erinos (2020)

menggambarkan! ketergantungan! daerah! terhadap! sumber! pendanaa!!eksternal. Semakin!!tinggi!!rasio kemandiriani mengandung! arti! bahwa! tingkat! ketergantungan! bantuan! dari pihak! luar, khususnya pemerintah!!pusat! dan!!propinsi semakin menurun, dan! demikian! pula!!sebaliknya. Rasio! kemandiriani juga! menggambarkan! tingkat! dukungan daerah! setempat! dalam! pembangunan! !daerah. Semakin!!tinggi!!rasio!!kemandirian, semakin! tinggi! pula! dukungan idaerah setempat dalam! membayar! pajak! dan! retribusi! daerah!!yang!!merupakan bagian utama ipendapatan iasli idaerah. Rasio kemandiriani daerahi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Kriterial untuk menetapkan! kemandirian keuangan! daerah mampu dikategorikan! seperti lberikut:

Tabel 3

Kriteria Kemandiriani Keuangani Daerahi

Persentase Kemandirian (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan	Pola Hubungan
0.00 – 25 %	Sangat Rendah	Instruktif
25 – 50 %	Rendah	Konsultatif
50 – 75 %	Sedang	Partisipasif
75 – 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Kepmendagri No.690.900.327/1996)

Pendapatani Aslii Daerahi (PAD)

Pendapatan! Asli Daerahl ialah pendapatanl yang dicapai daerahl dan diambil daril peraturan daerahl sesuai denganl peraturan lperundang-undanganl yang tercantum dalam “Pasall 1 lUndang-Undangl Nomor 33l Tahun l2004” tentangl Perimbangan Keuanganal Pusat danl Daerah. Sebagai wujud desentralisasi, PAD mempunyai tujuan untuk menyerahkan tanggung jawab Pemerintahl Daerah agar membiayail penyelenggaraan otonomil daerah sesuai dengan kemampuanl daerah. Pendapatan! Asli Daerahl diartikan sebagai! pendapatan yangl dimanifestasikan dalam yurisdiksi dan dianggap sebagai tambahan aset bersih dalam satu tahun anggaran. Pertumbuhannya harus didorong untuk menutup sebagian dari beban pengeluaran yang dibutuhkan.

Menurut Halim (2004), PADi adalah pemasukan yang dihimpun menurut peraturan daerahi pada sumber yang ada di dalam wilayah itu sendiri. Kemajuan dan pembangunan suatu daerahi dijamin oleh Pendapatani Asli Daerahnya yang tinggi, yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu daerah secara umum. Pendapatan daerahi yang semula tinggi

dapat menurunkan independensi pemerintah daerah dari pemerintah pusat seperti pendanaan APBD.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pendapatan yang dihimpun sesuai dengan pedoman wilayah yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berkedudukan di daerah sendirinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang masuk sepenuhnya ke pemerintah daerah serta membantu membiayai otonomi daerah.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2013), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk penerimaan yang berasal dari anggaran untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyerahan otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

3. Metode, Data, Analisis

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada sifat kepositifan yang dikenakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data, dan tujuan analisis data kuantitatif atau statistik adalah untuk mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena data yang diperoleh berupa angka-angka dari data yang masuk dalam laporan anggaran pemerintah dan diuji secara statistik, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang.

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017), sumber data sekunder meliputi orang atau dokumen yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 hingga 2022 menjadi sumber data

sekunder untuk penelitian ini yang diambil dari karawangkab.go.id, Badan Pusat Statistik serta sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistiki Deskriptifi

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data seperti jumlah sampel (N), nilai iminimum, nilai imaksimum, nilai irata-rata (mean) dan istandar deviasi. Hasil pengumpulan datai sekunder pada penelitian ini mengenai iPendapatan iAsli iDaerah, Danai Perimbangan, dan Kemandiriani Keuangani Daerahi Kabupaten Karawang Tahuni 2008-2022. Hasil analisisi statistiki deskriptifi pada penelitian ini ditampilkan pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Analisisi Statistiki Deskriptifi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	15	.10	.34	.2493	.08128
Dana Perimbangan	15	.61	1.14	.7547	.14207
Kemandirian Keuangan Daerah	15	.11	.55	.3513	.15170
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan! hasil! pengujian pada! table! 4.1 menjelaskan! bahwa!:

1. Variabeli Pendapatani Aslii Daerahi memiliki inilai iminimum sebesar 0.10 dan nilaii maksimumi sebesar 0.34, sedangkan nilaii meani sebesar 0.2493 dan standari deviasii sebesar 0.08128.
2. Variabeli Danai Perimbangani memiliki nilaii!minimum!!sebesar!!0.61 dan nilaii!maksimumi sebesar!!1.14, sedangkan nilaii!meani sebesar!!0.7547 dan standari deviasii sebesar 0.14207.

3. Variabeli Kemandiriani1Keuangani Daerahi memiliki!!nilai!!minimum!!sebesar!!0.11 dan! nilai!!maksimum!!sebesar!!0.55, sedangkan!!nilai meani sebesar!!0.3513 dan standari deviasii sebesari 0.15170.

Ujii Asumsi Klasiki

Ujii Normalitasi

Ujii Normalitasi bertujuan untuk membuktikan datai yang dipakaii dalamii penelitiai inii berdistribusii normali atau tidaki karena salah satu syarat sebelum melakukan ujii analisisi regresii berganda, datai yang digunakanii harus berdistribusii normal.. Uji inormalitas pada penelitiai ini menggunakan ujii Onei Sample iKolmogorov-Smirnov, apabila iAsymp. Sig (2-tailed) i lebih besari dari 0.05i maka datai berdistribusii inormal, isebaliknya jika iAsymp. Sig (2-tailed) lebihi kecili dari 0.05i makai datai tidaki iberdistribusi inormal. Berikut hasilii ujii normalitasi penelitiai ini, yaitu:

Tabel 5 Hasilii Ujii Normalitasi

One-Samplei Kolmogorov-Smirnovi Test

		Unstandardize d Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01729188
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.149
	Negative	-.157
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Pada tabel 5 diperoleh bahwa hasil pengujian normalitasi yaitu inilai iAsymp. Sigi (2-tailed)i sebesari 0.200i maka lebihi besari dari i0.05. Sehingga dapati disimpulkani bahwa idata yang digunakan penelitiai ini iberdistribusi inormal.

Ujii Autokorelasii

Uji Autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai iDurbin iWatson (DW) pada data penelitian. iData idapat idikatakan itidak terjadi iautokorelasi apabila nilai iDW diantara du dan (4-du) atau $du < DW < (4-du)$. Berikut hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.976	.972	.01806	1.779

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan table 6 hasil pengolahan melalui SPSS didapatkan nilai iDurbin Watsoni sebesar 1.779 kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel iDW pada signifikansi 5% dengan (n=36) dan jumlah variabel independen (k=3). Berdasarkan tabel iDW tersebut diperoleh nilai $du = 1.5432$, $dl = 0.9455$, $(4-du) = 2.4568$, dan $(4-dl) = 3.0545$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai $du < DW < (4-du)$ atau sama dengan $1.5432 < 1.779 < 2.4568$, sehingga model regresi disimpulkan tidak terjadi iautokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejseri bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi iheteroskedastisitas dengan cara meregres nilai absoluti residual. iData yang baik akan menghasilkan homoskedastisitas apabila seluruh variabel menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.023	.025		.912	.381
	PAD	.017	.066	.090	.251	.807
	Dana Perimbangan	-.025	.029	-.310	-.862	.407

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabeli 7 menunjukkan bahwa nilai Sig. pada variabeli PADi (X1) sebesar 0.807, dan nilai Sig. variabeli Danai Perimbangani (X2) sebesar 0.407. Pada model iregresi ini dapat disimpulkan bahwa itidak iterjadi iheteroskedastisitas. iHal ini idikarenakan nilai Sig. pada setiapi variabeli lebih ibesar dari i0.05.

Ujii Multikolinearitasi

Tujuani ujii multikolinearitasi adalah untuk memastikan apakah ivariabel ibebas dalam modeli regresi memiliki ikesamaan satu sama lain. iNilai itoleransi dan nilai iVIF (Variancei Inflationi Factor) dapat digunakan untuk menentukan iada iatau itidaknyai imultikolinearitas. Jika nilai *tolerancei* > i0.10 dan nilai VIFi < i10, maka itidak iterjadi imultikolinearitas

Tabeli 8 Hasil Ujii Multikolinearitasi

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Tolerance	VIF
		Coefficients	Std. Error	Coefficients				
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	.128	.044		2.893	.015		
	PAD	1.494	.119	.757	12.590	.000	.603	1.658
	Dana Perimbangan	-.274	.052	-.317	-5.272	.000	.603	1.658

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan table 8 menunjukkan bahwa nilaii Tolerancei dan VIFi untuk seluruh variabeli bebasi yaitu iPAD, dan Danai Perimbangani sebagai berikut:

1. Nilaii Tolerancei pada variabel pendapatan asli daerahi sebesar 0.603 > 0.10 dan nilaii VIFi sebesar 1.658 < 10, maka dapat idisimpulkan bahwa variabel PADi tidak terjadi multikolinearitas..
2. Nilaii Tolerancei pada variabel idana iperimbangani sebesar 0.603i>i0.10 dan nilaii VIFi sebesar 1.658i<i10, maka dapati disimpulkan bahwa variabel Danai Perimbangani tidak terjadi imultikolinearitas.

Analisis! Regresi! Linier! Berganda!

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Independensi Keuangan Daerah. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 \text{Dana perimbangan} + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kemandirian1 Keuangan Daerah

α = Konstanta

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

β = Koefisien regresi

ε = Standar error

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.128	.044		2.893	.015		
	PAD	1.494	.119	.757	12.590	.000	.603	1.658
	Dana Perimbangan	-.274	.052	-.317	-5.272	.000	.603	1.658

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan diatas, diperoleh hasil persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.128 + 1.494 PAD - 0,274 \text{ Dana Perimbangan} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan dari regresi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.128. Hal ini menyatakan bahwa variabel independent yaitu iPad, dan Dana Perimbangan tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya kemandirian1 keuangan 1 daerah berkurang sebesar 0.128.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai konstanta positif, hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan searah antara pendapatan asli daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Nilai konstanta variabel X1 sebesar 1.494, maka setiap peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu-satuan akan menyebabkan meningkatnya kemandirian keuangan daerah sebesar 1.494.
3. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai konstanta negatif, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan tidak searah antara dana perimbangan dengan kemandirian keuangan daerah. Nilai konstanta variabel X2 sebesar 0.274, maka setiap penambahan atau kenaikan dana perimbangan sebesar satu-satuan akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.274.

Uji Hipotesis

Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh tiap-tiap variabel independent secara masing-masing terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah: (1) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen; (2) jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen; (3) jika nilai Sig. > 0.05 , maka hipotesis teruji. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.128	.044		2.893	.015
	PAD	1.494	.119	.757	12.590	.000
	Dana Perimbangan	-.274	.052	-.317	-5.272	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Diolah Peleniti, 2023

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing variabel pada uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai T_{hitung} sebesar 12.590 jika dibandingkan dengan T_{tabel} sebesar 1.771, maka akan didapat hasil nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sama dengan $12.557 > 1.771$ serta nilai signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruhi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai T_{hitung} sebesar 5.272 jika dibandingkan dengan T_{tabel} sebesar 1.771, maka akan ditemukan hasil nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sama dengan $5.272 > 1.771$ serta nilai signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Uji F

Uji Simultani atau Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent yang berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} serta dapat dilihat dari nilai signifikannya. Berikut hasil hipotesis pada uji simultan adalah:

Tabel 11 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.146	2	.073	223.690	.000 ^b
	Residual	.004	11	.000		
	Total	.149	13			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan pada tabel 11 diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 223.690. Adapun F_{tabel} pada nilai signifikansi 0.05 serta derajat kebebasan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 11$ maka F_{tabel} didapat $F(2; 11) = 3.982$. Nilai F_{hitung} dan F_{tabel} selanjutnya dibandingkan, sehingga diperoleh nilai $223.690 > 3.982$ yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian dapat

disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan antara iPAD, dan iDana iPerimbangan terhadap iKemandirian ikeuangani daerah..

Koefisien!!Determinasi!!(R2)

Analisis koefisien!!determinasi!!digunakan! untuk! mengukur! seberapa! jauh! kemampuan! mode!!regresi dalam! menjelaskan variabel!!dependen. Jika koefisien! determinasi! mendekati satu, hal! ini! menunjukkan! bahwa! variable!!independen! yang! ada! memberikan! hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Berikut hasil koefisien determinasi:

Tabeli 12 Hasili Koefisieni Determinasii

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.972	.01806

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0.972 atau 97,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iPendapatan Asli Daerah, dan Danai Perimbangan berpengaruh sebesar 97,2% terhadap iKemandirian iKeuangan iDaerah. Sedangkan sisanya yaitu 2,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapat Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabeli 4. 7 diperoleh Nilai T_{hitung} sebesar 12.590 jika dibandingkan dengan T_{tabel} sebesar 1.771, maka akan didapat hasil nilai $iT_{hitung} > T_{tabel}$ atau sama dengan $12.557 > 1.771$ serta nilai signifikansi sebesar 0.000 yaitu lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya pendapat asli daerah berpengaruh terhadap iKemandirian iKeuangan idaerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Andriani & Wahidi (2018), Bambang Kurniawani (2009), Marizkai (2013), Puguhi et al (2021) yang menunjukkan bahwa pendapat asli

daerahi berpengaruh terhadap ikemandirian ikeuangan idaerah. Sedangkani menurut Nurhasanai & Mariai (2017) menyatakan pendapatani aslii daerahi tidak berpengaruh terhadap ikemandiran keuangani daerah..

Pengaruhi Danai Perimbangani Terhadap Kemandiriani Keuangani Daerahi

Berdasarkan tabeli 4.7 idiperoleh Nilai t_{hitung} sebesar 5.272 jika dibandingkan dengan T_{tabel} sebesar 1.771, maka akan ditemukan hasil nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sama dengan $5.272 > 1.771$ serta nilai isignifikansi sebesar 0.000i yaitu ilebih ikecil dari 0.05. Sehingga dapati disimpulkani bahwa H_0 iditolak idan H_a iditerima iyang iartinya idana iperimbangan berpengaruh signifikan terhadap ikemandirian ikeuangan idaerah

Hasili penelitiani ini sejalan dengan iAndriani & iWahid (2018), iBambang Kurniawani (2009), dan iSaleh (2020) imenyatakan ibahwa idana iperimbangan iberpengaruh inegative terhadap ikemandirian ikeuangan idaerah.

Pengaruhi Pendapatani Aslii Daerahi dan Danai Perimbangani secara simultani Terhadap Kemandiriani Keuangani Daerahi

Berdasarkan itabel 4.8i didapatkan bahwa F_{hitung} sebesar 223.690. Adapun F_{tabel} pada nilai signifikan 0.05 serta derajat! Kebebasan! $df_1 = 2$ dan! $df_2 = 11$ maka! F_{tabel} didapat $F(2; 11) = 3.982$. Nilai F_{hitung} dan F_{tabel} selanjutnya dibandingkan, sehingga diperoleh nilai $223.690 > 3.982$ yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan antara iPAD, dan Danai Perimbangani terhadap iKemandirian ikeuangan idaerah.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasani dalam penelitiani ini mengenai pengaruhi pendapatani aslii daerahi dani danai perimbangani terhadap kemandiriani keuangani daerahi Kabupaten Karawang tahun 2008 sampai 2022 dapati disimpulkani bahwai Pendapatani Aslii Daerahi berpengaruh positif dan isignifikan terhadap kemandiriani keuangani daerahi pada Kabupaten Karawang tahun 2008-2022. Danai Perimbangani berpengaruh inegative dan signifikan terhadap kemandiriani keuangani daerahi pada iKabupaten Karawang tahun 2008-2022. Pendapatani Aslii Daerahi dan iDana iPerimbangan secara isimultan iberpengaruh dan signifikan terhadap iKemandirian iKeuangan iDaerah pada iKabupaten Karawang tahun 2008-2022.

Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti ini agar bisa memberikan hasil yang baik pada penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya dapat lebih menggali potensi setiap daerah untuk mengatasi kemandirian keuangan daerah dengan memperhatikan pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen selain dalam penelitian ini seperti penerimaan pemerintah daerah yang lainnya serta dapat memperluas objek penelitian.

Referensi

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). *Pengaruh! Pendapatan! Asli! Daerah! Dan! Dana! Perimbangan! Terhadap! Kemandirian! Keuangan! Daerah! (Studi! Kasus! Pada! Pemerintah! Kota! Tasikmalaya! Tahun! 2006-2015)*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 13 Nomor 1.
- Edgar Rangkasa, & Zainudin. (2013). *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Danadyakasa Publisher.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating*. *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 2 No 1.
- Kurniawan, B. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Rutin Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. *Jurnal Jember: Universitas Jember*.
- Marizka, R. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)*. *Jurnal Perspektif Dan Pembangunan Daerah*, 2-22.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, 70-71.

Penerapan Manajemen Proyek pada Pemanfaatan Kulit Jeruk menjadi...

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Saleh, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, Vol 15 No.2.*
- Setiawan, P. et al. (2021). *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. Jurnal Menara Ekonomi, 47-48.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.